

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Yesus Kristus penulis panjatkan karena dengan limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya skripsi dapat penulis susun dan selesai untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Prof. DR. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor UPN “Veteran” Jatim.
2. Dra. Hj Ec Suparwati, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN “Veteran” Jatim.
3. Dra. Dyva Claretta, M.Si selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih atas segala kontribusi Ibu terkait penyusunan skripsi ini.
4. Juwito, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Jatim.
5. Drs. Syaifuddin Zuhri, M.Si sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UPN “Veteran” Jatim.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi maupun Staf Karyawan FISIP hingga UPN “Veteran” Jatim pada umumnya.
7. Bapak dan Ibu makasi buat dukungan, pengertian, dan DOAnyaa.. n Mas makasi buat bantuannya.
8. Sahabat-sahabat luar biasa yang tak sekedar memotivasi dari sebelum berlangsungnya proses proposal hingga selesainya proposal ini: Chyntia Manuhutu, Sarashati, Agnez Sorta, Rani Zamsilfani, serta Sealy rica.

9. Gerakan Pemuda “ter-KHUSUS panitia PASKAH n HUT,, trima kasih pengertian kalian,,memberikan waktu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi”..
10. Seluruh pihak yang tak dapat penulis sebutkan atas keterbatasan halaman ini, untuk segala bentuk bantuan yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik maupun saran selalu penulis harapkan demi tercapainya hal terbaik dari skripsi ini. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sekaligus menambah pengetahuan bagi berbagai pihak. Amin.

Surabaya, Mei 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 8
2.1 Media dan Konstruksi Realitas	8
2.2 Pers sebagai Institusi Ekonomi-Politik	10
2.3 Sidang Paripurna DPR Maret 2010	12
2.4 Analisis <i>Framing</i>	13
2.4.1 Proses <i>Framing</i>	14
2.4.2 Perangkat <i>Framing</i> Pan dan Kosicki	16
2.5 Kerangka Berpikir.....	24

BAB III	METODE PENELITIAN	25
3.1	Kerangka Konseptual	25
3.2	Subyek dan Obyek Penelitian	27
3.3	Unit Analisis	28
3.4	Populasi dan Korpus	28
3.5	Teknik Pengumpulan Data	29
3.6	Teknik Analisis Data.....	30
3.7	Langkah-langkah <i>Framing</i>	30
 BAB IV	 HASIL DAN PEMBAHASAN	 32
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	32
4.1.1	Profil Perusahaan Jawa Pos	32
4.1.2	Kebijakan Redaksional	37
4.2	Profil Perusahaan Kompas	43
4.2.1	Jaringan Distribusi	48
4.2.2	Kebijakan Redaksional.....	48
4.2.3	Profil Produk.....	51
4.3	Analisis Data.....	53
4.3.1	Berita Tanggal 3 Maret 2010.....	53
4.3.2	Berita Tanggal 4 Maret 2010.....	63
4.3.3	Berita Tanggal 5 Maret 2010.....	72

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kerangka <i>Framing</i> Pan dan Kosicki	23
Tabel 2.	Deskripsi Surat Kabar Jawa Pos	41
Tabel 3.	Jaringan Wilayah Distribusi Kompas	47
Tabel 4.	Sirkulasi Kompas Per Hari.....	47
Tabel 5.	Deskripsi Halaman Surat Kabar Kompas	52
Tabel 6.	Struktur <i>Frame</i> Jawa Pos	53
Tabel 7.	Struktur <i>Frame</i> Kompas.....	58
Tabel 8.	Struktur <i>Frame</i> Jawa Pos	63
Tabel 9.	Struktur <i>Frame</i> Kompas.....	68
Tabel 10.	Struktur <i>Frame</i> Jawa Pos	72
Tabel 11.	Struktur <i>Frame</i> Kompas.....	76
Tabel 12.	Pembahasan <i>Frame</i> Jawa Pos dan Kompas.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Kabar Jawa Pos 3 Maret 2010.....	89
Lampiran 2. Surat Kabar Jawa Pos 4 Maret 2010.....	92
Lampiran 3. Surat Kabar Jawa Pos 5 Maret 2010	96
Lampiran 4. Surat Kabar Kompas 3 Maret 2010	98
Lampiran 5. Surat Kabar Kompas 4 Maret 2010	101
Lampiran 6. Surat Kabar Kompas 5 Maret 2010	103

ABSTRAKSI

ARINI LAKSMI PALUPI. PEMBINGKAIAN BERITA BAILOUT CENTURY (Studi Analisis *Framing* Tentang Bailout Century Pada Sidang Paripurna SPR di Surat Kabar Jawa Pos dan Kompas)

Dua hari Senayan menjadi pusat perhatian. Sidang Paripurna Pansus Century menyedot perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Selama dua hari, dua surat kabar Jawa Pos dan Kompas menampilkan berita mengenai Sidang Paripurna. Tetapi didalam memberitakan, Jawa Pos dan Kompas membangun *Frame* yang berbeda. *Frame* Jawa Pos mengarah pada masyarakat, sedangkan *frame* Kompas mengarah pada pemerintah.

Tentang proses konstruksi realitas, prinsipnya setiap upaya “menceritakan” (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha untuk mengkonstruksi realitas. Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mengkonstruksi berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan berita di media pada dasarnya adalah penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah cerita atau wacana yang bermakna. Dengan demikian seluruh isi media tiada lain adalah realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk wacana yang bermakna

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis *framing* Pan dan Kosicki, dalam pendekatan ini *framing* dapat dibagi ke dalam empat struktur besar, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Berita-berita yang dianalisis adalah berita mengenai sidang paripurna DPR Maret 2010.

Hasil analisis peneliti dapat diketahui bahwa *frame* yang disajikan Jawa Pos adalah pemberian dana talangan pada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun bermasalah baik dalam hal kebijakan maupun pelaksanaan jelas-jelas melanggar hukum. Sedangkan *frame* Kompas adalah kebijakan bailout century merupakan usaha penyelamatan perekonomian dari krisis.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan ada perbedaan antara Jawa Pos dan Kompas dalam memberitakan kebijakan pemerintah tentang bailout century yang dibahas dalam sidang paripurna DPR Maret 2010. dimana Jawa Pos lebih condong menyalahkan kebijakan bailout century yang melanggar hukum. Sebaliknya Kompas lebih condong membenarkan kebijakan pemerintah karena ingin menyelamatkan perekonomian dari krisis. Sebagai salah satu sarana informasi, surat kabar seharusnya tidak melibatkan kepentingan apapun, baik politis maupun ekonomis dalam penyajian berita.

Keyword : Framing, Pan dan Kosicki, Bilout Century

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dua hari Senayan menjadi pusat perhatian. Rapat Paripurna Pansus Century menyedot perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia. Dua hal yang membuat publik sangat antusias. *Pertama*, isu Pansus itu sendiri. Kasus Bank Century itu telah menyeret tokoh penting di negeri ini. Yakni, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Keduanya dianggap bertanggung jawab dalam *bailout* Rp 6,7 triliun yang memunculkan pro dan kontra itu.

Hal *Kedua* yang membuat acara tersebut menjadi tontonan nomor satu adalah gaya para politisi. Paripurna benar-benar menjadi suguhan yang nikmat. Hujan interupsi dan bersilat lidah menjadi daya tarik yang luar biasa. Hari pertama, terjadi kericuhan yang berawal dari langkah Ketua DPR Marzuki Alie yang menutup rapat secara sepihak. Para wakil rakyat saling dorong dan saling hujat dengan kepala panas. Karena tidak bisa menahan emosi, salah seorang anggota DPR naik ke panggung dan nyaris memukul Marzuki Alie. Reaksi sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi, berasumsi bahwa apa yang dipertontonkan ketua DPR adalah sikap yang sarat dengan pelanggaran konstitusi.

Kericuhan tidak hanya terjadi di dalam ruang sidang, tetapi juga di jalanan, di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Ribuan demonstran dan polisi beberapa kali terlibat bentrok. Bentrok terjadi setelah mendengar kabar hasil sidang rapat

paripurna. Para demonstran membawa spanduk yang bertuliskan menghujat pemerintahan SBY-Boediono, demonstran berasal dari beberapa elemen mulai dari mahasiswa hingga masyarakat biasa.

Kekacauan dan emosi para anggota DPR menanggapi hasil kerja Pansus Hak Angket Century dipicu karena tidak becusnya ketua DPR Marzuki Alie mengendalikan Sidang Paripurna dengan menutup sidang di tengah-tengah interupsi para anggota sidang. Sikap Marzuki ini layak dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR menurut hakim konstitusi Akil Mochtar (Jawa Pos, 3 Maret 2010)

Setelah dua bulan bekerja, Pansus Hak Angket Century berakhir di Sidang Paripurna DPR. 325 anggota DPR memilih opsi C yang menyebutkan adanya pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century. Sedangkan opsi A yang di usung oleh Partai Demokrat, PAN dan PKB ini harus puas memperoleh 212 suara. Dengan rendahnya suara opsi A, menandakan Partai koalisi Presiden SBY tumbang di Sidang Paripurna (Jawa Pos, 4 Maret 2010)

Berakhirnya Sidang Paripurna dengan menetapkan bailout Century bermasalah dan memutuskan adanya pelanggaran hukum. Pemakzulan Wakil Presiden Boediono semakin mengemuka. Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia dianggap orang yang bertanggung jawab atas bailout Rp 6,7 triliun. Tetapi pemakzulan Boediono sangat sulit dilakukan (Jawa Pos, 5 Maret 2010).

Kericuhan Rapat Paripurna DPR, dengan agenda pembacaan hasil penyelidikan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century,

mengundang protes, baik di internal DPR maupun kalangan di luar parlemen. Kericuhan yang memalukan itu terjadi karena kurangnya pengalaman politik. Kericuhan dipicu penutupan rapat secara tiba-tiba oleh Marzuki Alie saat masih banyak anggota Dewan ingin berbicara. Namun Marzuki Alie, politikus Partai Demokrat itu, mengaku telah melaksanakan tugas sesuai dengan hasil rapat Badan Musyawarah DPR dan Peraturan Tata Tertib DPR (Kompas, 3 Maret 2010)

Koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono terlihat berantakan. Dewan Perwakilan Rakyat, memutuskan opsi C, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya diduga ada penyimpangan sehingga diserahkan ke proses hukum. Partai pendukung koalisi tak sepenuhnya mendukung pilihan Partai Demokrat, yaitu opsi A, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century dan penyalurannya tak ada masalah. Sikap Partai Demokrat hanya didukung penuh Partai Amanat Nasional (PAN). Sebaliknya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang semula sejalan dengan Demokrat ternyata seorang anggotanya, Lily Wahid, memilih opsi C. Bahkan, mayoritas anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih opsi C dan tak ada yang memilih opsi A (Kompas, 4 Maret 2010)

Menurut Presiden SBY temuan Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century tidak dapat dijadikan barang bukti di depan pengadilan semuanya perlu ditindak lanjuti. Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1954 Hak Angket tidak bisa menjadi alat bukti di pengadilan. Tentang perbedaan pendapat antar fraksi tidak perlu dirisaukan. Wakil Presiden Boedionopun juga memberikan

tanggapan atas pemakzulan dirinya semua pejabat negara harus tunduk pada hukum dan menjunjung tinggi amanat rakyat (Kompas, 5 Maret 2010)

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai peluang besar untuk diperhatikan dan mempunyai khalayak dalam memahami realitas karena itu dalam praktiknya, *framing* dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana (sobur, 2001:164)

Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandangan atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. *Framing* seperti dikatakan Todd Gitlin (Eriyanto, 2002:68) adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Melalui *frame*, jurnalis mengemas peristiwa yang dapat dipahami, dengan perspektif tertentu dan lebih menarik perhatian khalayak. laporan berita yang ditulis oleh wartawan pada akhirnya menampilkan apa yang dianggap penting, apa yang perlu ditonjolkan dan apa yang perlu disampaikan oleh wartawan kepada khalayak pembaca.

Dalam proses konstruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi atau alat narasi. Jika dicermati secara teliti, seluruh isi media entah media cetak maupun elektronik menggunakan bahasa, baik bahasa verbal (kata-kata tertulis atau lisan) maupun bahasa non-verbal (gambar, foto, gerak-gerik,

grafik, angka, atau tabel). Terdapat berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna, mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya, memperluas makna dari istilah-istilah yang ada, mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna yang baru, memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa (Hamad, 2004:12)

Penggunaan bahasa tertentu berimplikasi pada bentuk konstruksi realitas dan makna yang dikandungnya. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas ikut menentukan struktur konstruksi realitas dan makna yang muncul darinya. Dari perspektif ini, bahasa bukan hanya mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus dapat menciptakan realitas. Lebih dari itu, menurut Giles dan Wiemann bahasa (teks) mampu menentukan konteks, bukan sebaliknya teks menyesuaikan diri dengan konteks. Dengan begitu, lewat bahasa yang dipakainya (melalui pilihan kata atau cara penyajiannya) seseorang bisa mempengaruhi orang lain. Melalui teks yang dibuatnya, ia dapat memanipulasi konteks. Dalam komunikasi politik cara-cara seperti ini sering dilakukan oleh para aktor politik (Hamad, 2004: 13-14).

Sebagai satu bentuk analisis teks media, analisis *framing* mempunyai perbedaan yang mendasar dibandingkan dengan analisis isi kuantitatif. Prinsip analisis *framing* menyatakan bahwa terjadi proses seleksi isu dan fakta tertentu yang diberitakan media. Fakta tidak ditampilkan apa adanya, namun diberi bingkai (*frame*) sehingga menghasilkan konstruksi makna yang spesifik. Dalam hal ini biasanya media menyeleksi sumber berita, memanipulasi pernyataan, dan

mengedepankan perspektif tertentu sehingga suatu interpretasi menjadi lebih mencolok daripada interpretasi lain (Sobur, 2002:165)

Hal ini sejalan dengan pendapat Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang melihat *framing* sebagai cara untuk mengetahui bagaimana suatu media mengemas berita dan mengkonstruksi realitas melalui pemakaian strategis kata, kalimat, *lead*, hubungan antar kalimat, foto, grafik, dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan mereka sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Karena alasan itulah maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat *framing* milik Zhongdang dan Gerald M. Kosicki untuk mengetahui bagaimana Harian Jawa Pos dan Harian Kompas mengkonstruksi berita mengenai Sidang Paripurna DPR Maret 2010. Alasan peneliti menggunakan perangkat *framing* model Pan dan Kosicki, sebab model ini lebih memusatkan perhatian pada studi secara sistematis karena adanya pertarungan politik yang melingkupi selama Sidang Paripurna. Dari alasan itulah, peneliti menganggap bahwa model tersebut cocok digunakan untuk mengetahui konstruksi berita mengenai peristiwa Sidang Paripurna Maret 2010 dimana dalam Sidang Paripurna tersebut para politisi, baik yang menolak maupun yang mendukung pengambilan keputusan opsi A dan opsi C kebijakan *Bailout Century* saling beradu argumentasi untuk mendapatkan dukungan dari partai koalisi maupun partai lawan dan berusaha menjatuhkan lawannya melalui pernyataan-pernyataan yang memojokkan.

Dalam membingkai atau mengkonstruksi suatu realitas, antara media cetak satu dengan yang lain terdapat perbedaan. Seperti halnya pada surat kabar

Jawa Pos dan Kompas, dimana kedua harian ini memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyeleksi suatu isu dan menulis berita mengenai Sidang Paripurna anggota DPR pada bulan Maret 2010 yang membahas masalah pengambilan keputusan opsi A dan opsi C *Bailout Century*.

Kasus ini dipilih karena pengambilan keputusan untuk menentukan apakah *bailout* Bank Century yang dilakukan pemerintah dianggap bermasalah atau tidak, pengambilan keputusan dengan cara voting memilih antara opsi A yang menganggap *bailout Century* tidak ada masalah dan opsi C yang menganggap *bailout Century* bermasalah. Selain itu dalam Sidang Paripurna ketegangan sempat mewarnai selama sidang tersebut berlangsung, baik antara mahasiswa yang berunjuk rasa dengan pihak kepolisian maupun antar anggota DPR sendiri yang tidak terima sidang Paripurna diberhentikan secara sepihak oleh pimpinan sidang atau ketua DPR RI.

Alasan peneliti memilih harian Jawa Pos dan Kompas dikarenakan adanya perbedaan berita antara surat kabar Jawa Pos dan Kompas dalam memberikan masalah pengambilan keputusan opsi A dan opsi C yang dibahas dalam Sidang Paripurna. Perbedaan harian Jawa Pos dan Kompas dalam mengkonstruksi atau membingkai berita dikarenakan adanya perbedaan cara pandang wartawan dari masing-masing media dalam mempresentasikan kasus tersebut. Perbedaan dari cara kedua harian tersebut dalam mengemas berita disebabkan adanya perbedaan kebijakan redaksi dan juga perbedaan visi dan misi dari masing-masing media tersebut, dimana visi dan misi Jawa Pos adalah mempertahankan dan

mengembangkan perusahaan bisnis dengan melaksanakan fungsi pers(Jawa Pos, Leafled,2004).

Sebagai dua surat kabar terbesar, peneliti ingin mengetahui bagaimana kedua surat kabar ini memberitakan opsi A dan opsi C tentang kebijakan *Bailout Century* yang sempat menuai protes dari masyarakat di berbagai daerah.

Periode yang dipilih dalam penelitian ini adalah bulan Maret 2010 karena pada periode tersebut harian Jawa Pos dan harian Kompas memuat berita-berita mengenai Sidang Paripurna DPR Maret selama tanggal 2 Maret sampai 5 Maret 2010.

Sesuai dengan fungsinya, pers dalam hal ini media massa cetak seperti surat kabar, mempunyai beberapa fungsi antara lain untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, serta mempengaruhi khalayak pembaca yang menyebabkan surat kabar memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu surat kabar juga berperan sebagai kontrol di masyarakat. Dengan adanya kontrol sosial tersebut, surat kabar tidak hanya bersifat informatif tetapi juga persuasif, yaitu bukan hanya menyiarkan informasi, tetapi juga membujuk dan mengajak khalayak untuk mengambil sikap tertentu agar berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian atau gambaran, media massa mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Media massa ikut menentukan baik tidaknya masyarakat dan apa yang ditampilkan akan diikuti oleh khalayak. selain itu dalam media massa ada pemilik modal, pemimpin redaksi, pemerintah, dan masyarakat.

Masing-masing kelompok ini mempunyai ukuran, tuntutan, keinginan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan kepentingan ini yang membuka peluang memunculkan konflik kepentingan (*conflic of interest*), sehingga perlu adanya aturan yang konkret untuk membatasi apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak, sehingga diharapkan dapat mewadahi atau menjadi tolak ukur dalam mengatur “pergaulan” antara media massa, pemerintah, dan masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan media dapat memberikan pengaruh-pengaruh positif dan negatif. Dengan adanya peran tersebut media massa merupakan sebuah kekuatan raksasa yang sangat diperhitungkan.

Namun sebagian masyarakat berpendapat bahwa media massa tidak lebih banyak memberikan kebenaran atau fakta apa adanya. Media cenderung menciptakan peristiwa, menafsirkan dan mengarahkan terbentuknya kebenaran. Tidak selalu untuk melayani kepentingan pihak-pihak tertentu secara sepadan terkontrol. Maka yang namanya realitas dan subyek politik menjadi luntur, keduanya tidak selalu menjadi penting ketimbang yang dikatakan media tentang realitas dan subjek politik tersebut (Sobur, 2002 : 30-31)

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa media massa mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terlepas dari bagaimana wartawan mengemas dan menyajikan beritanya. Karena media massa juga merupakan jembatan dalam membangun stabilitas nasional serta kontrol sosial antara pemerintah dan masyarakat, yang dalam penyampaianya tidak hanya dapat disampaikan secara langsung namun secara efisiensi dan efektifitas hal tersebut juga dapat disampaikan melalui media massa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimanakah pembingkai berita *bailout Century* tentang Opsi A dan Opsi C di Sidang Paripurna pada Surat Kabar Jawa Pos dan Surat Kabar Kompas?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

“Mengetahui pembingkai berita *bailout Century* tentang Opsi A dan Opsi C di Sidang Paripurna pada Surat Kabar Jawa Pos dan Surat Kabar Kompas”

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran pada institusi terutama pada harian Jawa Pos dan Kompas khususnya dalam membingkai atau mengkonstruksi suatu realitas.
- b. Masyarakat dapat memahami realitas yang dibangun oleh media massa khususnya pada harian Jawa Pos dan Kompas.